

JURNAL

**DINAMIKA HUBUNGAN CINA-ASEAN: REGIONALISME
EKONOMI DI PERBATASAN DI LAUT CINA SELATAN**



Ditulis oleh:

NUR ARY RIZQIAN

95510310

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

UNIVERSITAS MUHAMADDIYAH YOGYAKARTA

2016

BAB I

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan-perubahan besar dan terjadi dengan sangat cepat dalam sistem internasional. Salah satu tantangan baru yang mengundang banyak perhatian adalah mengenai konsep keamanan. Perubahan konstelasi politik yang terjadi di Asia Pasifik dewasa ini telah mendorong negara-negara di kawasan ini, tidak terkecuali para anggota ASEAN, untuk semakin memperhatikan masalah keamanan. Meningkatnya persengketaan mengenai kepulauan Spratly dan Paracel yang melibatkan Cina dan negara-negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam) ini ditimbulkan dari konflik Laut Cina Selatan yang menimbulkan konflik bilateral (bilateral dispute) dan sengketa antar negara (multilateral dispute).

Kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya konflik militer di kawasan Asia Pasifik selalu menarik untuk dikaji. Pasca Perang Dunia, kawasan Asia Pasifik lebih dipandang sebagai kawasan yang ditinjau dari aspek ekonomi yang sedang berkembang daripada aspek keamanan regionalnya. Kawasan ini menyimpan potensi konflik yang dapat mempengaruhi keamanan dunia. Kawasan – kawasan Asia Pasifik yang rawan akan terjadinya konflik adalah Selat Taiwan, Semenanjung Korea, dan Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang membentang dari Selat Malaka di barat daya sampai Selat Taiwan di timur laut. Kawasan ini terdiri dari 200 kepulauan termasuk Kepulauan Spratlys dan Paracel. Secara geografis Laut Cina

Selatan adalah kawasan yang strategis karena perairan ini merupakan jalur transportasi laut dan militer yang padat. Laut Cina Selatan juga merupakan ladang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Letaknya yang strategis dengan cadangan minyak bumi dan gas alam yang melimpah, kawasan ini menyimpan potensi konflik bagi negara-negara di sekitarnya. Klaim-klaim kepemilikan atas wilayah di perairan Laut Cina Selatan mewarnai dinamika konflik tersebut.

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN CINA-ASEAN

Hubungan Cina-ASEAN di Masa Perang Dingin

Sengketa territorial atas Kepulauan Spratly dan Paracel selalu menyangkut kepentingan nasional negara-negara yang mengklaimnya. Kedaulatan nasional dan integritas wilayah adalah hal yang dipermasalahkan. Semua negara pengklaim menganggap kepentingan ini sebagai yang utama. Inilah alasan negara begitu mempersiapkan segala hal dengan begitu luar biasa untuk membela citra, kehormatan, dan kebanggaan nasional. Perairan ini juga mengandung nilai strategis yang menjadi salah satu kepentingan negara pengklaim. Jalur pelayaran di perairan ini merupakan 25% dari rute pelayaran dunia dan melintasi Kepulauan Spratly. Kontrol atas kepulauan ini berarti dominasi atas rute pelayaran di Asia Pasifik. Kedekatan geografis kawasan Asia Tenggara dengan China ikut mempengaruhi kedekatan ideologis pula. Di samping itu perhatian yang diberikan Amerika Serikat (AS) pada negara-negara Asia Tenggara terkait dengan isu memerangi terorisme di kawasan atas adanya gerakan Islam radikal

membuat China tidak mau kalah dalam menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Akan tetapi negara-negara Asia Tenggara, melalui ASEAN berupaya untuk tidak berpihak pada keduanya, dan hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab menurunnya hubungan ASEAN dengan China.

Semasa Perang Dingin, China hadir sebagai aktor baru yang sedang dalam mengembangkan ekonomi dan memperkuat militer, dan banyak menyebarkan pengaruh komunis di Asia Tenggara, yang dekat secara geografis. Dalam hal ini AS khawatir apabila China menjadi sebuah polar kekuatan baru dengan pertumbuhan ekonomi dan militernya yang dapat mengganggu tatanan dunia pada saat itu (Goh, 2007).

Hubungan Cina-ASEAN Paska Perang Dingin

China mulai mengintensifikasi hubungan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin melalui banyak bentuk kerjasama utamanya dalam bidang ekonomi, dan pembentuka ASEAN + 3 (ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan). Juga dalam bidang keamanan, China bergabung dalam Forum Regional ASEAN (ARF, ASEAN Regional Forum) yang didirikan pada tahun 1994 bersama dengan beberapa negara Pasifik lainnya. ARF memberikan kesempatan bagi para Menteri Luar Negeri dari 17 negara kawasan Asia Pasifik dan perwakilan dari Uni Eropa (EU, European Union), untuk duduk bersama membicarakan masalah keamanan kawasan. Dalam hal ini China berusaha untuk mewujudkan *Security Policy Conference* dalam kerangka kerja ARF tersebut. Di mana dengan demikian China dapat menjadi salah satu posisi kunci yang penting dalam ARF. Dalam bidang sosial budaya, dibentuk pula Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC, ASEAN Sosio-Cultural Community)

yang bertujuan untuk, “...*promote a people-oriented ASEAN in which all sectors or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building*” (Piagam ASEAN, pasal 1 ayat 13).

Hubungan negara-negara ASEAN dengan China saat ini telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dibandingkan pada masa Perang Dingin. Terlihat dari kerjasama yang terjadi dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi adalah kerjasama melalui ACFTA. Dalam bidang keamanan melalui keterlibatan China dalam ARF.

BAB III

ISU PERBATASAN LAUT CINA SELATAN CINA-ASEAN

Klaim Cina Berbentuk “U” di Wilayah Laut Cina Selatan

Konflik di Laut Cina Selatan dapat di kategorikan dalam 4 Hal ; Perebutan wilayah, lokasi untuk perikanan, eksplorasi dan pengembangan minyak, dan gas. Konflik di Laut Cina Selatan ini sebenarnya bukanlah konflik di antara semua negara ASEAN secara komprehensif, konflik ini sebenarnya lebih terpusat pada tumpang tindih wilayah dengan Filipina, Vietnam, dan Thailand, namun pada perkembangannya negara-negara seperti ; Indonesia, Malaysia, dan Brunei juga terkena gelombang permasalahan wilayah di Laut Cina Selatan.

Konflik maritim dan teritorial di Laut Cina Selatan menyeret 5 negara, yaitu : Cina, Brunei, Malaysia, Filipna, dan Vietnam. Tumpang tindih klaim yang terjadi

diantara Negara-negara tersebut tidak dapat terpecahkan dalam jangka waktu yang singkat. Perkembangan konflik ini berdasarkan dari klaim berbentuk “U” Cina yang mengoverlapping dan meresahkan ASEAN.

Dari negara-negara tersebut hanya Brunei yang klaimnya memiliki legalitas, sedangkan negara lain yang mengklaim menurut patokan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berjarak 200 mil dari batas pantai wilayahnya. Dalam perkembangannya setiap negara memiliki klaim sepihak yang rumit dan unik, dimana klaim itu secara otomatis memperpanjang wilayahnya minimal 200 mil, sama dengan patokan maksimal ZEE, meskipun terjadi ‘overlapping’ dalam klaimnya dengan negara lain. Kerumitan ini bisa bertambah dengan klaim sepihak yang lebih jauh dari ZEE menjadi diatas 350 mil seperti yang diklaim oleh Cina dan Vietnam.

Konflik Laut Cina Selatan: Perebutan Klaim Sumber Daya Alam

Sebagai wilayah yang disengketakan, Laut Cina Selatan secara terus menerus bisa menjadi jalan buntu. Sekarang minyak dan gas menjadi satu-satunya aspek sengketa di Laut Cina Selatan, yang bisa menjadi kunci untuk dilakukan pengembangan secara bersama (joint development) di area tersebut.

BAB IV

KERJASAMA EKONOMI CINA-ASEAN

Perubahan Geo Politik Asia Tenggara, Pandangan Ekonomi dan Politik Cina di Awali Dari Deng Xiaoping Membuka Pintu Kerjasama Ekonomi Cina-Asean

Cina di bawah Deng Xiaoping yang mampu memulihkan ekonomi moneter di negaranya hingga mampu melunasi hutang-piutang merupakan hal signifikan yang di capai serta mengagetkan dunia di masa global ekonomi moneter krisis yang tidak menentu, terlebih lagi bahwa perubahan Cina pada dasarnya memiliki dampak besar terhadap dunia, dikarenakan Cina sebagai salah satu aktor besar perpolitikan internasional selain Amerika dan Rusia.

Langkah, strategi, dan kebijakan Cina mengacu pada potensi SDA dan perdagangannya, terutama minyak crude oil yang rawan, fluktuasi harga sangat tinggi dipasar dunia. Momen tersebut diolah dengan baik di bidang produksi, kemampuan Cina untuk menyerap teknologi dari Uni Soviet menjadi alasan utama perkembangan Cina yang stabil hingga saat ini.

Cina akhirnya melihat ASEAN bukan sekumpulan negara bermasalah, namun lebih kearah pembangunan kerjasama ekonomi dan pengembangan pasar, akhirnya Cina dengan semangat “wai xiang jing ji zhan rei” nya yaitu strategi ekonomi yang ‘go internasional’ memiliki Asia sebagai pasar utamanya, kerjasama Cina dengan Asia memiliki angka tertinggi di banding kerjasamanya dengan Afrika maupun negara-negara di Amerika Latin, cara pandang Deng Xiaoping terbukti bahwasannya kerjasama ekonomi dengan negara-negara ketiga sangat bermanfaat. Kerjasama ekonomi Cina-ASEAN belum memiliki nilai-nilai legalitas tertentu dan keterikatan, namun hanya “deal to deal basis”, walau begitu perkembangan ekonomi Cina-ASEAN di masa Deng Xiaoping ini mengalami perkembangan hingga 7,4 persen.

Kelanjutan Kerjasama Ekonomi Cina-Asean Paska Deng Xiaoping

Kerjasama ekonomi Cina-ASEAN di tandai dengan kunjungan dari berbagai petinggi Cina, diawali dari perdana menteri Li Peng saat berkunjung ke Bangkok yang menegaskan bahwa: “Cina akan membangun kerjasama ekonomi dan mendukung inisiatif kerjasama regional bersama-sama ASEAN”, Cina menunjukkan besarnya kepentingan Cina menjaga ke amanan Asia Tenggara sebagai bagian dalam usahanya untuk membangun kerjasama ekonomi dengan ASEAN.

Pada tahun 1986 Li Peng mengirim wakil perdana menteri Cina Tian Jiyun untuk melakukankunjungan ke 4 negara di ASEAN sebagai bagian dari penerusan agenda kerjasama ekonomi Cina-Asean nya, dalam kunjungannya itu Tian Jiyun berkali-kali menegaskan bahwa kerjasama ekonomi Cina-ASEAN akan semakin menjadi prospek yang bagus bagi ke 2 belah pihak.

BAB V

KESIMPULAN

Setelah satu dekade berlalu dengan tenang, konflik Laut Cina Selatan muncul kembali sebagai topik utama dalam perdebatan tentang isu keamanan di Asia Timur.

Cina mencoba untuk menghapus persepsi tentang Cina sebagai ancaman di Asia Tenggara dengan membentuk kembali keberpihakan negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina menggunakan diplomasi “soft power,” sementara ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara telah menerapkan strategi “constructive engagement” terhadap Cina sebagai upaya untuk membuat Cina terlibat di dalam organisasi regional dan

meyakinkan Cina untuk menerima sejumlah norma-norma regional dan kebiasaan-kebiasaan regional, seperti keterlibatan secara multilateral dan ASEAN way.

Salah satu upaya untuk menguatkan kerjasama dan mengembalikan kepercayaan yang hilang itu saat Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang mengunjungi Asia Tenggara. Xi mengusulkan untuk mempererat hubungan Cina-ASEAN dengan membentuk suatu “komunitas dengan tujuan bersama” (community of common destiny). Perdana Menteri Li juga berupaya dengan menegaskan bahwa Cina dan ASEAN seharusnya mempromosikan “kehidupan bertetangga dan kerjasama yang bersahabat antara Cina dan negara-negara ASEAN.”

Keterlibatan secara positif telah berkontribusi terhadap pembentukan hubungan regional yang positif secara keseluruhan, menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi Cina dan Asia Tenggara pada saat yang bersamaan. Seandainya saja tidak ada keterlibatan secara timbal balik dengan pendekatan “soft power,” situasi di Asia Timur akan terlihat sangat jauh berbeda sekarang, dan tatanan tersebut telah terbentuk di atas nilai-nilai bersama, yang merupakan nilai-nilai regional, bukan nilai-nilai yang dipaksakan secara eksternal.